

BULLETIN

www.indonesiasipf.co.id

Investor Protection Month 2023: Memperkuat Komitmen Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia

Peningkatan Kapasitas Anggota DPP Melalui Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Program Pelatihan Berkelanjutan

Kegiatan Penghitungan Aktifitas Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia SIPF

Catatan Kegiatan Indonesia SIPF

INVESTOR PROTECTION MONTH 2023: Memperkuat Komitmen Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia



“Kehadiran Indonesia SIPF dalam struktur pasar modal 10 tahun silam menunjukkan komitmen regulator dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor di pasar modal Indonesia.”

Indonesia SIPF sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) diberikan amanah oleh OJK untuk mengelola dan mengadministasikan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) guna memberikan ganti rugi kepada investor yang mengalami kehilangan asetnya yang disimpan pada kustodian. Dengan peran dan fungsi ini diharapkan akan membawa *positive vibe* di tengah keragu-raguan masyarakat akan keamanan berinvestasi di pasar modal Indonesia kala itu.

Beberapa tahun berjalan, gaung ini rasanya masih belum terlalu menggema di kalangan masyarakat awam. Masih saja banyak stigma yang menyatakan bahwa pasar modal hanya untuk “membuang uang” atau “anggap saja uang hilang”, dan yang paling menyedihkan adalah munculnya investasi-investasi ilegal yang justru

lebih populer dari instrumen pasar modal. Bahkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian yang tercatat akibat investasi ilegal mencapai Rp126 triliun, bukan jumlah yang kecil dibandingkan dengan aset yang ada di industri pasar modal.

Sebagai respon atas fenomena tersebut, sejak tahun 2021 Indonesia SIPF mencoba untuk lebih menggaungkan *message* terkait perlindungan investor secara khusus maupun ajakan untuk berinvestasi yang aman dan nyaman di pasar modal Indonesia secara umum sebagai bentuk komitmen lebih dalam menyelenggarakan perlindungan investor. Oleh karenanya, teretuslah sebuah rangkaian kegiatan yang bertajuk Investor Protection Month (IPM) atau Bulan Perlindungan Pemodal. Sebuah bulan yang diperingati sebagai

bulan dimulainya perlindungan investor oleh Indonesia SIPF sejak diterbitkannya Izin Usaha OJK sebagai PDPP pada tanggal 11 September 2013. Sehingga, rangkaian kegiatan IPM biasanya dimulai sejak bulan Agustus hingga Oktober tahun berjalan dimana bulan September dijadikan puncak perayaan IPM.

Di tahun pertama penyelenggaraan IPM yaitu di tahun 2021, rangkaian kegiatan

berlangsung secara sederhana, padat, singkat namun tetap mengena di kalangan para investor. Bekerjasama dengan Anggota DPP, Indonesia SIPF fokus untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pada *circle* yang terbilang cukup *intimate*. Dimulai dari *training of trainers* dari Anggota DPP dan dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi kepada para nasabah dari Anggota DPP terpilih pada kegiatan Sekolah Pasar Modal

(SPM) maupun kegiatan lainnya.

Mendapatkan *feedback* yang cukup baik di tahun 2021 dari berbagai pihak termasuk dari OJK dan SRO, IPM mulai naik kelas dan berevolusi di tahun 2022. Rangkaian kegiatan ini mulai “*dibundling*” dengan berbagai kegiatan yang menunjang perlindungan investor, diantaranya adalah pemecahan rekor MURI untuk *login* AKSES KSEI yang menjangkau hampir di seluruh kota di Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini, rangkaian IPM 2022 berfokus tidak hanya literasi dan edukasi namun juga dari segi inklusi. Penggunaan AKSES KSEI yang merupakan wadah/sarana bagi investor untuk dapat melakukan pengecekan aset investor secara berkala ini menjadi penting mengingat salah satu syarat dilindunginya investor oleh DPP berdasarkan POJK adalah memiliki *Single Investor Identification* (SID), yang saat ini sudah terhubung dengan AKSES KSEI. Selain itu, untuk pertama kalinya Indonesia SIPP menjadi salah satu partisipan dalam mendukung OJK pada *World Investor Week* (WIW) yang diselenggarakan oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO) dengan menjadikan rangkaian IPM sebagai kegiatan yang mendukung WIW.

Melanjutkan kesuksesan di tahun 2022, rasanya masih terlalu dini untuk berpuas diri mengingat fakta di lapangan masih banyak “PR” yang harus diperjuangkan dan dilawan bersama seperti maraknya investasi ilegal yang masih banyak berkelebaran di masyarakat. Ironinya, berdasarkan Hasil Survei Nasional Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 sektor pasar modal, pada tahun 2022 tingkat inklusi berada pada angka 5,19% dari 1,55% di tahun 2019, yang justru lebih tinggi dari tingkat literasi pada angka 4,11% yang menurun dari 4,92% di tahun 2019. Selain itu berdasarkan data aduan dan konsultasi pemodal Indonesia SIPP dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masyarakat

Three down, more to go. Tiga tahun kiranya belum cukup untuk berpuas diri. Rangkaian IPM diharapkan akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat guna memperkuat komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan investor yang dimulai dari peningkatan angka literasi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal.



seringkali merasa bingung dan tidak tau harus mengadu ke siapa terkait permasalahan yang mereka alami. Oleh karenanya, Seminar Nasional sebagai puncak dari IPM 2023 mengusung tajuk “Investor Dirugikan, Kemana Harus Mengadu?”. Dengan menghadirkan pembicara dari OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia SIPP berusaha untuk memberikan pemahaman atas banyaknya perangkat yang dapat digunakan masyarakat apabila terjadi *dispute*. Sehingga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat yang merasa ada “yang tidak beres” dengan investasi mereka agar bisa segera melaporkan ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

Rangkaian perhelatan IPM 2023 kembali berfokus pada literasi dan edukasi yang kali ini dilakukan lebih *massive*

dengan menggandeng Anggota DPP, Kantor Perwakilan BEI dan Galeri Investasi BEI. Kegiatan edukasi sukses menyelenggarakan 216 kegiatan dan melibatkan kurang lebih 26 ribu peserta di seluruh Indonesia. IPM 2023 sekaligus pula memperingati 10 tahun atau 1 dekade perlindungan investor oleh DPP yang diselenggarakan Indonesia SIPP. Sebuah bilangan tahun yang sudah tidak bisa dibbilang sedikit lagi, dan sudah memasuki dua digit angka, seyogyanya dapat menjadi *moment* untuk bercermin, melakukan evaluasi dan bebenah diri atas semua pencapaian dan hal-hal yang masih butuh pengembangan maupun berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pada kesempatan ini telah terpilih logo dan *tagline* 10 tahun Indonesia SIPP dari kompetisi yang diselenggarakan sebagai bentuk penyampaian pesan *personal branding* Indonesia SIPP kepada masyarakat luas. Diharapkan selama satu tahun

ke depan, pesan bahwa investasi di pasar modal Indonesia sudah aman terlindungi dapat menggebu di tengah masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang cerdas dan bijak dalam berinvestasi yang pada akhirnya akan membawa pada kemajuan negara Indonesia secara umum.

Karena literasi dan edukasi adalah suatu langkah awal dalam memberikan perlindungan kepada investor dan calon investor. Bermodal pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan industri pasar modal yang aman untuk berinvestasi akan turut berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Maju terus pasar modal Indonesia!

Ditulis oleh: Ririh Asih Priyahita - Head of Corporate Secretary, Investor Protection & Legal Indonesia SIPP (seperti yang dimuat pula dalam IDXBell Edisi 12 - Oktober 2023)

PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DPP Melalui Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Program Pelatihan Berkelanjutan



Training of Trainer Anggota DPP

Pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2023, Indonesia SIPP telah melaksanakan kegiatan *training of trainer* (ToT) terkait perlindungan Pemodal yang diperuntukkan bagi karyawan Anggota DPP. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah pemahaman karyawan Anggota DPP, baik yang berasal dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan Bank Kustodian (BK). Indonesia SIPP mengun-

dang setiap Anggota DPP untuk mengikutsertakan karyawannya. Diselenggarakan secara *online* melalui *Zoom meeting*, kegiatan ini mendapatkan antusiasme yang cukup baik dari Anggota DPP. Secara total dari tiga sesi sosialisasi yang dilaksanakan, terdapat lebih dari 170 peserta yang bergabung baik dari PPE dan juga BK.

Pada setiap sesi sosialisasi, diawali oleh sambutan Direksi Indonesia SIPP baik oleh Bapak Narotama Aryanto selaku Direktur

Utama maupun Ibu Mariska Arityanto selaku Direktur. Dilanjutkan dengan pemaparan materi perlindungan DPP oleh Indonesia SIPP yang dibawakan oleh Bapak Bayu Priguna selaku Kepala Satuan Manajemen Strategi dan Pengembangan Bisnis, Bapak Muhammad Arif selaku Kepala Divisi Operasional, dan Bapak Wahyudi Saptono selaku Kepala Divisi Penunjang. Materi yang disajikan bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia SIPP bagi

peserta yang baru bergabung dalam sesi pemaparan sosialisasi, maupun meningkatkan pemahaman bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah bergabung. Tidak hanya pengenalan mengenai DPP dan PDPP, dalam materi juga di-*refresh* kembali mengenai kewajiban Anggota DPP, serta *update* perkembangan terbaru dalam hal perlindungan investor khususnya terkait Indonesia SIPP. Hal tersebut diantaranya mengenai Undang-Undang P2SK, *Roadmap* Pasar Modal 2022-2027 OJK, *Disgorgement & Disgorgement Fund*, Penerapan Prinsip Syariah dan Fasilitator Mediasi.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, tidak hanya dilakukan pemaparan materi oleh Indonesia SIPP, namun juga dari perwakilan KSEI yang memaparkan mengenai statistik perkembangan investor, fitur dan layanan yang disediakan KSEI, serta mengenai AKSes KSEI. Pemaparan materi oleh KSEI terkait erat dengan materi oleh Indonesia SIPP, mengingat perlindungan DPP oleh Indonesia SIPP berlaku bagi Aset Pemodal yang disimpan di Sub Rekening Efek Nasabah di KSEI. Diharapkan dengan pemaparan materi oleh kedua pihak dapat memberikan gambaran yang semakin komprehensif atas perlindungan investor khususnya terkait penyimpanan Aset Nasabah.



PADA TANGGAL 11-12 OKTOBER 2023, INDONESIA SIPP MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PELATIHAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR KEUANGAN DENGAN MENGUNDANG PESERTA DARI PERUSAHAAN EFEK DAN BANK KUSTODIAN ANGGOTA DPP, SRO DAN ANAK PERUSAHAAN SRO.

Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan kerjasama antara Indonesia SIPP dengan The Indonesia Capital Market Institute (TICMI). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Anggota DPP serta semakin menciptakan hubungan baik dengan Anggota DPP.

Topik pelatihan yang diangkat tahun ini adalah "Implementasi Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)". Pelatihan dibuka oleh *welcoming speech* dari Direktur Indonesia SIPP, Ibu Mariska Arityan Azis dan dilanjutkan kemudian oleh Direktur TICMI, Ibu Shara Soekarno. Pada pelatihan ini disampaikan juga *keynote*

speech oleh Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan, dan EPK Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bapak Sabar Wahyono. Pada hari pertama terdapat dua sesi pemaparan materi yang keduanya disampaikan oleh OJK, yaitu mengenai Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen di Pasar Modal yang disampaikan oleh Bapak Junaidi Cerdas Tarigan (Analisis Senior Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK) dan mengenai Studi Kasus Implementasi Penanganan Pengaduan Konsumen di Pasar Modal melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang disampaikan oleh Ibu Ika Dianawati Nadeak (Pengawas Senior Deputi Direktur

Pelayanan Konsumen dan Pemeriksaan Pengaduan Pasar Modal OJK).

Pada hari kedua pelatihan, terdapat dua sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan MedAr-Fin. Sesi pertama mengenai Peran LAPS SJK yang disampaikan oleh Bapak Tri Legono Yanuarachmadi (Direktur Layanan Sengketa LAPS SJK) dan sesi kedua mengenai Studi Kasus Masalah Perlindungan/Sengketa Perdata Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan oleh Ibu Lily Widjaja (Co-founder, Wakil Ketua Bidang Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan MedAr-Fin).

Pelaksanaan kegiatan ini mendapatkan

antusiasme yang tinggi dari para peserta. Total peserta yang hadir sebanyak kurang lebih 230 peserta dengan rincian sekitar 190 peserta merupakan peserta *Workshop* dan 40 peserta merupakan peserta PPL-WPPE. Diharapkan di waktu mendatang Indonesia SIPP senantiasa dapat memberikan nilai tambah bagi para Anggota DPP, salah satunya melalui kegiatan pengembangan kompetensi seperti pelatihan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Ditulis oleh: Luhur Anindito - Claim and Membership Indonesia SIPP

KEGIATAN PENGHITUNGAN Aktifitas Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia SIPP



Sumber <https://greenworldwide.com>

Indonesia SIPP sebagai Perusahaan Anak dari *Self Regulatory Organization* (SRO) pada Bulan Mei 2023 telah melakukan Penghitungan Aktifitas GRK (Emisi Karbon) yang dihasilkan Perusahaan sepanjang Tahun 2022 dan telah dilaporkan kepada SRO pada 7 Juni 2023. Hal ini sejalan dengan komitmen dari SRO terhadap isu-isu terkait standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan mempertimbangkan semakin kritisnya permasalahan seperti perubahan iklim, rantai pasok yang beretika (*ethical supply chain*), kerusakan sumber daya alam, dan kesejahteraan global.

Penghitungan Emisi Karbon ini merupakan suatu tindak lanjut dari *awareness* yang telah dilakukan oleh SRO mengenai *Climate Change* dan *Assessment* Emisi Karbon pada 24 Oktober 2022 di lingkungan SRO dan Perusahaan Anak. Dalam kegiatan ini dipaparkan mengenai komitmen SRO terkait isu *Climate Change* yang juga menjadi perhatian Pemerintah. Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement*, yang merupakan kesepakatan global

untuk menghadapi perubahan iklim, melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Untuk itu, SRO berkomitmen untuk turut membantu Pemerintah mencapai Target Nasional Pengurangan Emisi Karbon sebesar 32% dengan upaya sendiri atau 43% dengan dukungan Internasional, dan dimulai dengan inisiatif kegiatan penghitungan Emisi Karbon di lingkungan SRO dan Perusahaan Anak.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai SRO di Pasar Modal Indonesia menginisiasi kegiatan Penghitungan Emisi Karbon di ruang lingkup SRO dan Perusahaan anak melalui *Kick Off Meeting* Penghitungan Emisi Karbon di Lingkungan SRO dan Perusahaan Anak untuk Tahun Emisi 2022 yang berlangsung pada 11 April 2023. Pada kegiatan ini dipaparkan secara lengkap ruang lingkup penghitungan emisi yang dibagi dalam *scope* 1, 2, dan 3 sebagai berikut:



EMISI SCOPE 1

Emisi *scope 1* tergolong sebagai emisi yang muncul langsung dari Perusahaan sekaligus entitas yang berada di bawah Perusahaan tersebut. Emisi *scope 1* memiliki empat kategori yaitu:

- *Stationery Combustion* atau pembakaran stasioner yang mencakup semua sumber bahan bakar dan pemanas yang menghasilkan Emisi Karbon.
- *Mobile Combustion* atau pembakaran kendaraan yang meliputi proyek karbon yang berasal dari semua jenis kendaraan yang merupakan milik Perusahaan.
- *Fugitive Emissions* atau emisi bocor yang mencakup kebocoran Emisi Karbon dari sumber tertentu seperti pendingin udara atau lemari pendingin.

- *Process Emission* atau emisi proses yang mencakup Emisi Karbon yang berasal dari proses manufaktur dan industri apapun.

EMISI SCOPE 2

Emisi *scope 2* merupakan emisi dari pembangkit energi yang dibeli penyedia utilitas secara tidak langsung. Mayoritas sumber emisi *scope 2* untuk Perusahaan adalah konsumsi energi listrik.

EMISI SCOPE 3

Emisi *scope 3* merupakan emisi murni secara tidak langsung yang ada pada nilai Perusahaan seperti emisi hulu dan hilir. Emisi tersebut terkait dengan aktifitas operasional seperti perjalanan Karyawan dan rantai pasok Perusahaan seperti pengadaan

barang dan jasa.

Dalam rangka koordinasi kegiatan Penghitungan Emisi Karbon di lingkungan SRO dan Perusahaan Anak, maka SRO meminta ditunjuknya *Person in Charge* (PIC) pada masing-masing Perusahaan. Dalam hal ini Indonesia SIPP menunjuk Bayu Priguna selaku Kepala Satuan Manajemen Strategi dan Pengembangan Bisnis sebagai PIC dan telah melaporkan penunjukan ini kepada SRO pada 2 Mei 2023. Adapun kegiatan ini juga mendapatkan pendampingan yang dilakukan oleh Divisi Pengelolaan Strategi Perusahaan dan Anak Usaha BEI bersama Konsultan Eksternal.

Penyusunan Laporan secara internal melibatkan beberapa Divisi dan Satuan terkait, terutama Divisi Penunjang yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi yang relevan dalam penghitungan emisi,

antara lain fungsi umum yang mengelola mengenai kebutuhan operasional Perusahaan seperti Perjalanan Dinas, Listrik, dan lain-lain, serta fungsi akuntansi dan keuangan yang menyediakan data-data terkait rantai pasok Perusahaan. Selanjutnya, Laporan Aktifitas GRK yang telah disusun dibahas bersama Direksi pada 31 Mei 2023 dan dilakukan beberapa penyempurnaan, sebelum kemudian disetujui dan dilaporkan ke SRO. Direksi juga menekankan agar Perusahaan mulai menyiapkan *action plan* untuk tahun-tahun selanjutnya, untuk mengurangi atau minimal menjaga tingkat Emisi Karbon yang telah dicapai pada Tahun 2022.

Ditulis oleh: Bayu Priguna - Head of Strategic Management and Business Development Indonesia SIPP

CATATAN KEGIATAN Indonesia SIPP



Sebagai bagian dari upaya Indonesia SIPP untuk meningkatkan *awareness* dan literasi masyarakat terhadap mekanisme perlindungan investor di pasar modal, maka Indonesia SIPP terus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan, seperti OJK, SRO, Anak Usaha SRO, Anggota DPP, dan Komunitas Pasar Modal.

Selama periode Mei hingga Oktober 2023, tercatat sekitar 40 kegiatan dilaksanakan oleh Indonesia SIPP baik secara tatap muka (*offline*) maupun virtual (*online*). Beberapa *event* besar yang diikuti oleh Indonesia SIPP antara lain Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) di Aceh pada tanggal 20 September 2023 yang bekerjasama-

ma dengan OJK dan Kantor Perwakilan (KP) BEI Aceh, serta kegiatan edukasi dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan dan *World Investor Week* 2023 di Cirebon pada tanggal 11 dan 14 Oktober 2023 bekerjasama dengan OJK Cirebon dan KP BEI Jawa Barat.

Indonesia SIPP terus berkomitmen untuk memberikan edukasi terkait perlindungan investor dan investasi yang aman di pasar modal Indonesia kepada masyarakat umum, calon investor, investor, dan pelaku pasar modal lainnya, untuk dapat semakin meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* tersebut dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, dan diharapkan juga turut mengurangi risiko terjabaknya masyarakat pada kasus investasi ilegal di Indonesia.

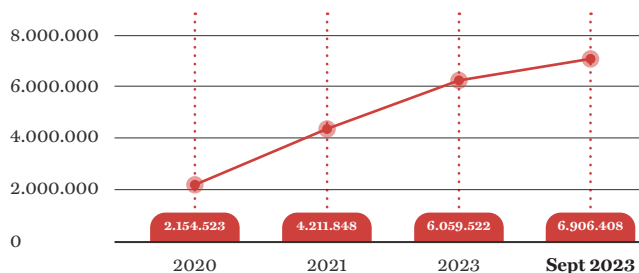


HIGHLIGHT STATISTIK 2023

HINGGA SEPTEMBER 2023

Total Jumlah Pemodal yang Dilindungi

Rp6.906.408, Growth YTD: 7,06%



Layanan Konsultasi Pemodal

Pesan Whatsapp.

+62 811 3336 5553

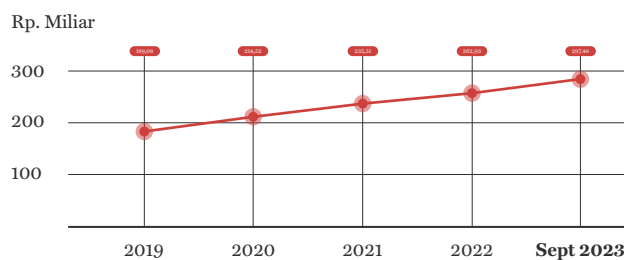
Hotline. 021 515 5553

www.indonesiasipf.co.id



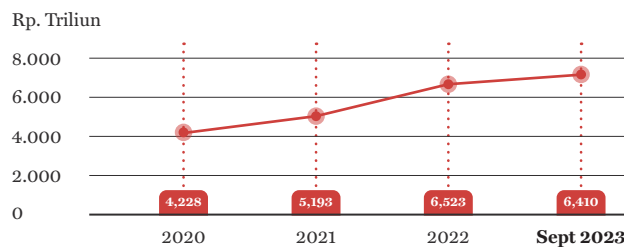
Nilai DPP

Rp 297.479.312.229, Growth YTD:14,65%



Total Aset Pemodal yang Dilindungi

Rp 7.224 Triliun, Growth YTD: 26,48%



Redaksi

Sekretaris Perusahaan / Divisi Penunjang

Ririh Asih Priyahita / Wahyudi Saptono & Zulrasydi Amin